

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA SRIBUNGA KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR (OKUT)

Elsa Lettiyani¹⁾ Isabella²⁾ Novia Kencana³⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30129

Email: elsalettiyani98@gmail.com ¹⁾ isabella@uigm.ac.id ²⁾ kencananovia@uigm.ac.id ³⁾

Abstract

The family planning village program is a new innovation packaged by the government to strengthen the family planning and family development population program by narrowing the scope of targets, namely the village level area unit and certain criteria. The research raised the problem of how the village family planning program was implemented in Sribunga village, Buay Pemuka Bangsa Raja sub-district, Ogan Komering Ulu Timur district and how the village family planning program was implemented in improving community welfare. The purpose and usefulness of the writer of this thesis is to know the implementation of the KB village program in Sribunga Village, Buay Pemuka Bangsa Raja Subdistrict, East OKU Regency. In this thesis the author uses qualitative research methods ranging from data collection methods used are observation, interviews and documentation, descriptive with the stages of data reduction, data exposure, and conclusions. The results showed that by using the theory of Edward III to analyze there are four indicators, namely (1) communication seen from the delivery of information, clarity of information and socialization has gone well, it's just that the clarity of information has not gone well as expected because the target group has not been that way. be able to understand what the implementor said. (2) Resources there are three sub indicators, namely human resources, budget resources and facility resources. The implementation of the village family planning program in Sribunga village is not sufficient because human and budgetary resources have not been able to support the success of the village family planning program. (3) The disposition in implementing the attitude of the implementors and target groups is quite good in responding to the KB village program, it's just that the knowledge and understanding of the implementers in Sribunga Village is not yet optimal, which makes program implementation activities not yet having an impact on improving welfare. (4) The structure of the bureaucracy in implementing the SOP is guided by the technical manual for the KB village and fragmentation is structured.

Keywords: *Implementation, village family planning program, welfare*

Abstrak

Program kampung keluarga berencana (KB) merupakan inovasi baru yang dikemas oleh pemerintah untuk memperkuat program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dengan mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu satuan wilayah setingkat Desa dan kriteria tertentu. Penelitian mengangkat masalah mengenai bagaimana implementasi program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan bagaimana pelaksanaan program kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan kegunaan penulis skripsi ini adalah ingin mengetahui implementasi program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif mulai dari metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data bersifat deskriptif dengan tahap mereduksi data, paparan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Edward III untuk melakukan analisa terdapat empat indikator yaitu (1) komunikasi dilihat dari penyampaian informasi, kejelasan informasi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, hanya saja dalam kejelasan informasi belum begitu berjalan sesuai dengan harapan karena kelompok sasaran belum begitu bisa memahami apa yang disampaikan oleh implementor. (2) Sumber daya terdapat tiga sub indikator yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Dalam pelaksanaan program kampung KB di Desa Sribunga belum memadai karena sumber daya manusia dan sumber daya anggaran belum bisa menunjang keberhasilan program kampung KB tersebut. (3) Disposisi dalam pelaksanaan sikap implementor dan kelompok sasaran sudah cukup baik dalam merespon program kampung KB, hanya saja pengetahuan dan pemahaman implementor yang berada di Desa Sribunga belum begitu optimal, yang membuat kegiatan pelaksanaan program belum berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan. (4) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SOPnya berpedoman pada buku petunjuk teknis kampung KB dan fragmentasi telah terstruktur.

Kata Kunci : *Implementasi, program kampung KB, kesejahteraan*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia di kategorikan sebagai negara berkembang dari segi ekonomi masyarakat terbelah belum mencapai kategori sejahtera. Apalagi laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga cukup tinggi berdasarkan databoks jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Dilihat dari data tersebut tingginya jumlah penduduk Indonesia maka akan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang, terdapat banyak problematika yang dihadapi pemerintah Indonesia yaitu angka pengangguran tinggi, tingginya angka kemiskinan, pembangunan yang belum merata, pendidikan berkualitas yang belum merata, dan permasalahan lainnya. Sehingga pemerintah dituntut untuk lebih ekstra dalam mengatasi permasalahan yang ada. Jumlah penduduk yang besar juga mempengaruhi potensi kesejahteraan bagi masyarakat, dan tidak menjamin keberhasilan pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang besar ini menimbulkan dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar bagi Indonesia untuk keberlangsungan kehidupan karena Indonesia harus bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju, dan disatu sisi lain dapat menyebabkan beban negara menjadi semakin besar.

Program Keluarga Berencana (KB) telah di bentuk pada periode perintisan (1950-an-1966), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dahulu adalah sebuah organisasi KB dimulai dari pembentukan perkumpulan dokter Indonesia. Pada periode pelita I (1969-1974) ini mulai dibentuk BKKBN berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Hingga pada periode pasca reformasi ditetapkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga hingga saat ini Undang-Undang tersebut tetap berlaku. BKKBN membuat program untuk pengendalian laju penduduk di Indonesia dan menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Menurut Diannada (2019) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab lajunya pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu karena tidak begitu berdampaknya program KB pada masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga program KB kurang dipahami oleh masyarakat serta menurunnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan pentingnya program KB di masyarakat, menurunnya penggunaan alat kontrasepsi bagi keluarga yang telah menikah. Di Indonesia sendiri masih banyak di kalangan masyarakat menengah kebawah terutama di daerah pedesaan memilih menikah muda serta keinginan masyarakat

untuk menambah anggota keluarga lebih dari dua anak di dalam sebuah keluarga walaupun Pemerintah menganjurkan dua anak lebih baik dalam selogan dari BKKBN.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga dapat mempengaruhi lingkungan seperti berkurangnya ekosistem hutan karena secara bertahap hutan akan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk dan bertambahnya penduduk juga bertahap mengakibatkan terbatasnya sumber daya makanan dan energi akibat dari kerusakan lingkungan hidup. Selain mempengaruhi lingkungan, dampak pertumbuhan penduduk mempengaruhi beberapa faktor di antaranya adalah berkurangnya lahan karena faktor pembangunan, ketersediaan lapangan pekerjaan semakin berkurang mengakibatkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya (Diannada 2019).

Menyikapi permasalahan peningkatan penduduk, pemerintah Indonesia kemudian fokus menjalankan program KB Pada dasarnya hasil dari program KB berguna untuk pembangunan dan berkembang masyarakat Indonesia itu sendiri. Pelaksanaan program kampung KB dimandatkan kepada BKKBN sebagai lembaga Nonkementrian. BKKBN merupakan lembaga resmi pelaksana teknis program yang pelaksan kegiatannya terstruktur secara hierarkis dan terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan hingga kelurahan/desa.

Program KB dikemas dalam inovasi baru berupa Kampung KB. Menurut website resmi Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Program Kampung KB di canangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir. Joko Widodo) pada januari 2016 untuk menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana oleh BKKBN, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembangian urusan pemerintah antara pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang melatar belakangi pembentukan kampung KB yaitu (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBP serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) penguatan program KKBP yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ketiga yaitu memulai

pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta agenda prioritas ke lima, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010-2030 (wibe site kampung KB).

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPk serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, kampung KB ini dibentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPk dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (*mindset*) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya.

Program Kampung KB dikemas untuk mewujudkan keluarga sejahtera tidak hanya dibidang KB saja, melainkan juga dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kampung KB diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai atau peran dari program KB untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) program Kampung KB di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut, salah satunya adalah di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja tepatnya di Dusun I Desa Sribunga. Menurut Anggraeni, Afifuddin dan Suyeno (2020:34) dengan adanya Kampung KB dapat menghidupkan kembali program KB untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam mengendalikan kelahiran sekaligus terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sribunga adalah salah satu desa dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja yang menjadi lokasi penelitian. Menurut profil Desa Sribunga terdiri dari tiga dusun dengan jumlah penduduk 2099 jiwa. Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai aktifitas ekonomi yang masih rendah, karena rata-rata masyarakat desa sribunga mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani, dari segi aspek sumber daya manusia masih banyak masyarakat di Desa Sribunga yang berpendidikan rendah. Sehingga kemampuan dan

skill bekerja mereka masih sangat kurang dan menyebabkan masyarakat hanya memanfaatkan tanaman pertanian dan perkebunan. Masyarakat Desa Sribunga tingkat keluarga pra sejahtera sangat tinggi.

Kampung KB di Dusun I Desa Sribunga mulai dilaksanakan pada februari 2018. Sejak keluarnya surat keputusan Kepala Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Nomor 140/8/2001/2018 tentang pembentukan dan penetapan pengurus Kampung KB. Kampung KB di Desa dari awal terbentuk pada 2018 hingga 2019 telah melaksanakan bermacam-macam program sesuai dengan yang dicanangkan oleh BKKBN sesuai dengan tugas dari program kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan telah tersedianya juga rumah data sebagai dokumen data yg bisa dilihat oleh semua masyarakat ataupun semua yg berkunjung, dan sebagai rumah untuk berbagai kegiatan dan perkumpulan bagi pengurus kampung KB. Serta terdapat kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) hingga 2019 kelompok tersebut masih tersedia.

Dusun I merupakan salah satu dari tiga dusun di Desa Sribunga dengan angka keluarga pra sejahtera yang cukup tinggi Berdasarkan hasil pemuktahiran data keluarga dari profil kampung KB tahun 2018 Desa Sribunga bahwa jumlah penduduk Dusun I tercatat sebanyak 671 jiwa yang terdiri dari 316 jiwa laki-laki dan 355 jiwa perempuan. Disisi lain jumlah kepala keluarga 147 Kartu Keluarga (KK) yang jika dirinci berdasarkan tingkat kesejahteraannya adalah: Pra sejahtera 58 KK, keluarga sejahtera I 84 KK, keluarga sejahtera II 5 KK, serta keluarga sejahtera III dan III plus 0 KK. Permasalahan yang terdapat di Kampung KB Desa Sribunga yaitu masih banyaknya masyarakat pra sejahtera.

Data Kesejahteraan tersebut menunjukkan perlu adanya penanganan khusus terhadap persoalan Kesejahteraan di Desa Sribunga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi program kampung KB sebagai salah satu andalan dalam penanganan kasus kesejahteraan tersebut. Program kampung KB merupakan salah satu gerakan membangun desa dan termasuk dalam program penanggulangan kesejahteraan. Program Kampung KB sesuai dengan tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya di bidang KB melainkan di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Sehingga menarik menjadi sebuah penelitian bagaimana implementasi program kampung KB dalam menangani persoalan keluarga pra sejahtera di Dusun I Desa Sribunga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba melaksanakan penelitian dengan mengambil judul "Implementasi Program Kampung KB Di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur".

A. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Implementasi Program KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur. Maka Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

Bagaimana Implementasi Program Kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

C. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dan menjadi refrensi bagi mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian selanjutnya, bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada implementasi program Kampung KB.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait masalah implementasi program KB khususnya pada DPPKB dan BKKBN.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Sugiyono dalam (Gunawan, 2016) yaitu mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data atau langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung.

Menurut Sugiyono (2016:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi peneliti yang didapatkan melalui wawancara. Penelitian ini adalah narasumber dari pihak pelaksana program kampung KB yaitu Pembina Petugas Keluarga Berencana (PKB), Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pengurus kampung KB, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kader BKB, kader BKR, Kader BKL, Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan perwakilan masyarakat Desa Sribunga. Menurut Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan (Gunawan, 2016:210). Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa penelitian kualitatif yaitu reduksi data, paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) (Gunawan, 2016:210).

2. Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Publik

Hardiyansyah (2017:21), Implementasi kebijakan adalah melaksanakan Undang-Undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kinerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan.

Mulyadi (2018:52), Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

B. Proses Implementasi

Abidin (2016:170), Proses implementasi adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk, dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan ke arah yang dikehendaki.

C. Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C Edward III

Menurut George C Edward III dalam (Indiahono, 2017:31-32) terdapat empat indikator penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik hingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas pelaksana (implementor) yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya financial menjadi keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan financial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Yaitu menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemukan dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahapan-tahapan program secara konsisten. Sikap demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menunjukkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Menunjukkan bahwa struktur demokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas.

D. Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut data petunjuk teknis Kampung KB, Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

E. Tujuan Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut data petunjuk teknis Kampung KB terdapat dua tujuan pada program Kampung Keluarga Berencana yaitu: *Pertama*, secara umum dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. *Kedua*, tujuan Kampung KB secara khusus:

1. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja;
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
6. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
8. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
10. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
11. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di kelompok PIK KRR/remaja;
12. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.

F. Implementasi Program Kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

Implementasi program kampung KB di desa Sribunga adalah sebagai inovasi strategis program dari BKKBN yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB di Desa Sribunga di bentuk pada tanggal 02 februari 2018 sesuai dengan surat keputusan kepala Desa Sribunga. Kampung KB di Desa Sribunga telah melaksanakan berbagai program sesuai dengan yang direncanakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian program Kampung KB dalam mensejahterakan masyarakat desa sribunga setelah dilakukannya penelitian serta pengumpulan data lapangan, baik itu observasi dan wawancara dengan informan, maka peneliti memperoleh data dan informasi tentang program kampung KB di Desa Sribunga. Peneliti menggunakan teori dari Edward III sebagai indikator

untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung KB di Desa Sribunga.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator penting dalam keberhasilan program kampung KB, suatu program akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara implementor dengan kelompok sasaran, dengan komunikasi akan menunjukkan bahwa setiap program harus ada penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan sosialisasi program agar kemungkinan tidak akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga implementor program kampung KB di Desa Sribungan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dapat terlaksana dengan baik. Pengetahuan implementor tentang tujuan program kampung KB yang dikerjakan dapat berjalan dengan apabila komunikasi juga dapat terjalin dengan baik atas setiap keputusan dan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur terkait dengan komunikasi yang telah terlaksana dari awal pencanangan kampung KB sejak tanggal 02 Februari 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa dilihat dari masyarakat Dusun I Desa Sribunga mereka telah mengetahui adanya program kampung KB pada awal pencanangan kampung KB masyarakat diundang untuk meresmikan program tersebut. Dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan seluruh pihak terkait dengan program kampung KB yang diterapkan. Dilihat dari pihak implementor hasil penelitian yang dilakukan menurut Ibu Masnur, SE, Ibu Yuliati, Bapak Tarmizi Al, Ibu Sun'ah, Bapak Rusman Efendi dan Ibu Julaila menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin sangat baik dan tidak ada kendala atau masalah, baik dari pihak Dinas PPKB, PKB/PLKB Kecamatan, PPKB/SUB PPKBD, Kader BKB, BKR, BKL, Kelompok UPPKS dan PIK-R, dan perangkat pengurus kampung KB, serta pihak masyarakat juga terjalin dengan baik. Sehingga koordinasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Untuk Sosialisasi sudah dilaksanakan pihak implementor kepada masyarakat tahap demi tahap menjelaskan apa tujuan kampung KB, dengan pemasangan plang selamat datang, tersedianya rumah data serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi upaya implementor melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bentuk sosialisasi terus diupayakan dengan memberikan pemahaman, manfaat program itu sendiri, langkah-langkah untuk mencapai program tersebut, dan memberikan kejelasan bahwa sasaran program kampung KB adalah masyarakat itu sendiri dan menurut Ibu Siti Subaidah bahwa masyarakat telah mengikuti pencanangan kampung KB serta diberikan pengarahan dan penjelasan tentang tujuan kampung KB, dan pelaksanaan kampung KB merupakan program untuk membantuk masyarakat yang ada di Dusun I guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian jelas bahwa menunjukkan untuk informasi yang terjalin di kampung KB sangat

baik. Dilihat dari pihak implementor dan kelompok sasaran terkoordinasi dengan baik, kelompok sasaran sudah menerima sosialisasi tentang program kampung KB.

Selanjutnya mengenai kejelasan informasi tentang kampung KB yang telah terlaksana di Dusun I sudah cukup jelas hal ini diungkapkan oleh ibu Yuliati bahwa untuk kejelasan informasi sudah sesuai dengan arahan serta prosedur, mendapat informasi dari pihak Dinas PPKB yaitu dari kepala bidang selanjutnya akan disalurkan kepada pengurus kampung KB dan selanjutnya kepada masyarakat. Ditahap ini implementor mendapati kendala dalam penyaluran informasi untuk kelompok sasaran yaitu dikarenakan dalam penyampaian kejelasan informasi belum bisa ditangkap pemahamannya, hal ini dilihat dari yang diungkapkan oleh Ibu Siti Tukinah bahwa dalam penyampaian informasi pihak implementor harus lebih ekstra dengan mengunjungi rumah kerumah kelompok sasaran demi kejelasan informasi. Terkait kejelasan informasi kampung KB di Dusun I Desa Sribunga demi berjalan dengan baik sejak awal sudah berpedoman sesuai arahan, dilakukannya pembinaan, sosialisasi, pelaksanaan pelaporan hingga evaluasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menekankan setiap program harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor dan kelompok sasaran. Sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas sangat dibutuhkan karena untuk menunjang keberhasilan sebuah program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan program kampung KB di Dusun I Desa Sribunga masih terdapat kekurangan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Masnur, SE. Sumber daya manusia dari segi kuantitas atau jumlah dari pengurus kampung KB yang terdapat di Desa Sribunga masih kurang karena untuk PPKBD/SUB PPKBD itu masih merangkap dua jabatan sekaligus, seperti ketua kampung KB yaitu Bapak Tarmizi Al ia merangkap sebagai PPKBD juga, dan pengurus lainnya ada yang merangkap sebagai kader, sehingga mereka harus bekerja lebih ekstra dan bisa merangkap tugas agar berjalan efektif. Menurut masyarakat yang diungkapkan oleh Ibu Cik Yu kemampuan implementor dalam menyampaikan program kampung KB sudah cukup baik hanya saja dari pengurus kampung KB yaitu kader serta pengurus lainnya yang berada di Desa Sribunga masih kurang dari segi kualitasnya. Dilihat dari ungkapan Ibu Cik Yu tersebut jumlah implementor yang kurang akan berdampak pada kemampuan, jumlah masyarakat di Dusun I Desa Sribunga tidak memiliki kekurangan, sehingga sejak terdapat kampung KB jumlah akseptor KB bertambah dan keberadaan kampung KB menjadi lebih efektif, terkait hal itu jumlah implementor yang

cukup akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, pembinaan dan pelayanan tetapi jumlah implementor masih kekurangan dan dari segi kompetensi dan kemampuan juga belum memadai, hal ini perlu diberikan pembinaan. Menurut Ibu Yulianti bahwa sudah dilakukannya pembinaan kepada kader serta pengurus kampung KB untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan, hanya saja pihak PPKBD/Sub PPKBD, Kader BKB, BKR, BKL, dan kelompok UPPKS kurang aktif dan semangat, ditambah kelompok PIK-R yang tidak aktif dalam pembinaan serta kegiatan. Dan Ibu Nurhayati berpendapat bahwa pengurus kampung KB bersemangat ikut pembinaan jika ditambah dengan uang transport dan makan. Hal ini akan menghambat keberhasilan program kampung.

Sumber daya anggaran adalah sumber daya yang melibatkan dana untuk menunjang kebutuhan program kampung KB. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk masalah anggaran juga mengalami kekurangan, bukan saja kekurangan sumber manusia, sumber anggaran juga mengalami masalah. Anggaran menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kampung KB hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti Hayun bahwa anggaran yang didapat hanya pada saat pembinaan, itu saja didapatkan saat pembinaan dilakukan oleh pihak Dinas PPKB dalam tiga bulan satu kali, untuk uang transport sebesar Rp. 50.000/individu, dan masalah anggaran ini tidak dibantu juga oleh ADD sehingga untuk anggaran di kampung KB tidak ada. Pada saat pencaangan kampung KB untuk kebutuhan berupa plang, perlengkapan yang ada dirumah data, hingga dana untuk sosialisasi awal dibiayai oleh Dinas PPKB, dan untuk kegiatan selanjutnya tidak terdapat dana, hal ini dibenarkan oleh Ibu Masnur, SE bahwa untuk masalah anggaran dikelola oleh Dinas PPKB sehingga pihak PKB/PLKB dan pengurus lainnya tidak tau menau soal sumber anggaran yang tersedia.

Sumber daya fasilitas merupakan sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan program kampung KBB yaitu layak diadakan untuk kegiatan keberhasilan program kampung KB di Dusun I desa Sribunga. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Tarmizi Al bahwa fasilitas yang ada di kampung KB sudah cukup untuk pelaksanaan kegiatan. Seperti tempat yang digunakan itu tersedia yaitu rumah data, dan setiap kegiatan itu dilaksanakan bukan hanya dirumah data saja bisa di balai Desa, di rumah-rumah kader atau pengurus lain nya yang bersedia dan untuk fasilitas lainnya juga sudah tersedia, tidak ada keluhan dari pihak pengurus dan masyarakat, selain itu pengurus juga tidak mengeluhkan fasilitas untuk menunjang berjalannya kegiatan.

3. Disposisi

Diposisi adalah watak dan karakteristik yang memiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis yang berasal dari pribadi setiap implementor, karakter yang paling penting yang dimiliki oleh implementor adalah komitmen. Disposisi dibutuhkan agar program bisa berjalan dengan baik apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka

implementor dapat menjalankan program sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat program.

Berdasarkan hasil penelitian implementor yang terdapat di kampung KB di Dusun I Desa Sribunga menurut Ibu Yulianti bahwa sikap para implementor yang di berikan dengan adanya program kampung KB dalam melaksanakan kegiatan menunjukkan bahwa menerima dengan sangat baik karena program kampung KB untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Sribunga, dan menjadi tantangan untuk implementor dalam melaksanakan tujuan dari program kampung KB. Begitu juga dengan pihak masyarakat, mereka menerima dengan baik program kampung KB, dan merasa terbantu dengan adanya program kampung KB. Masyarakat sebelum adanya program kampung KB khususnya untuk ibu-ibu belum begitu mengenal program KB hal ini diungkapkan Ibu Yulianti. Sehingga masyarakat banyak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, jarak kelahiran anak tidak teratur.

Untuk implementor program kampung KB di Desa Sribunga dilihat dari pengetahuan dan pemahaman terhadap kampung KB serta komitmen dalam pelaksanaan program kampung KB. Dilihat dari hasil penelitian bahwa terhadap pelatih yang dilakukan demi keberhasilan program, pelatihan yaitu pembinaan yang diberikan oleh pihak Dinas PPKB dan PKB/PLKB kecamatan guna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pihak perangkat kampung KB, kader-kader dan pihak yang terkait program. Menurut Ibu Sun'ah terdapat kendala dalam pelatihan yaitu saat melakukan pembinaan dan menyalurkan kepada masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang enggan ikut dalam pembinaan yang diberikan oleh pihak pengurus kampung KB. Bukan hanya saat pembinaan saja, dalam pelaksanaan pelayanan KB gratis masyarakat juga enggan dengan alasan jauh dan tidak memiliki kendaraan. Sehingga pengurus kampung KB harus lebih ekstra dalam pembinaan kepada masyarakat dan tidak semua kesediaan dan kemauan pengurus aktif baik pembinaan dan kegiatan program kampung KB, dan implementor tetap melakukan pembinaan kepada masyarakat walaupun kehadiran masyarakat mulai berkurang. Hal ini bisa dilihat bahwa implementor mempunyai komitmen dalam masyarakat program kampung KB.

Bentuk kegiatan yang diberikan oleh pihak implementor yakni kegiatan BKB dipadukan dengan posyandu serta memberikan pembinaan, BKL yaitu senam lansia, memberikan pelayanan kesehatan, serta pembinaan. BKR dilaksanakan pembinaan tentang pendidikan dan kesehatan reproduksi serta keluarga dengan mengumpulkan remaja serta keluarga remaja, kegiatan membuat kerajinan kelompok UPPKS, penyuluhan, dan pelayanan KB secara gratis, dan memberikan bantuan jika ada. Dilihat dari kegiatan tersebut bisa dilihat bagaimana pengurus kampung KB melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan intensitas mereka terhadap program. Menurut Ibu Yulianti kegiatan yang dilakukan oleh pengurus kampung KB sudah terlaksana hanya saja belum

optimal, ditambah dengan kelompok PIK-R itu tidak ada, remaja di Dusun I desa sribunga tidak begitu berpartisipasi dalam program kampung KB, dan mengakibatkan banyak remaja yang nikah dini. Menurut Ibu Siti Subaidah bahwa para kader, dan pengurus kampung KB lainnya dilihat dari cara mereka melakukan pembinaan terlihat belum begitu memahami, dan untuk petugas KB sudah cukup jelas dalam melakukan pembinaan. Akan tetapi para kader, serta pengurus kampung KB lainnya mereka mengetahui tujuan dari program kampung KB, memahami bahwa program ini yakni membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk, hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal.

Dapat dijelaskan dari hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa disposisi belum tercapai secara maksimal hal ini dikarenakan kurangnya semangat dari pihak implementor. Sehingga dari segi pengetahuan dan pemahaman belum maksimal, dan dilihat komitmen para implementor sudah cukup hal ini dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembinaan yang sudah terlaksana. Dan masyarakat juga masih mengabaikan program kampung KB yang mengakibatkan belum berjalan dengan efektif sehingga belum berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yaitu termasuk tata aliran kerja birokrasi, yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Dan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu adanya prosedur yang standar (*standard operating procedur* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Pada indikator ini Peneliti akan ingin mengetahui SOP yang menjadi pedoman bagi implementor di kampung KB apakah prosedur birokrasi yang rumit atau kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian dan indikator struktur birokrasi, SOP yang digunakan adalah buku petunjuk teknis kampung KB sebagai pedoman, langkah-langkah dalam melaksanakan program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur. Dari awal kegiatan yaitu penyuluhan, pembinaan, sosialisasi dan selanjutnya tahap evaluasi dilakukan sesuai dengan pedoman buku petunjuk teknis kampung KB hal ini diungkapkan oleh Ibu Yuliati. Selanjutnya Fragmentasi yaitu pembagian tugas dan wewenang yang terkait dengan pembagian tugas dan wewenang sudah dilaksanakan, pembagiannya sudah sesuai dan terstruktur. Fragmentasi dalam hal ini sudah dilaksanakan dan setiap bagian dari pelaksana program kampung KB sudah memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dan sesuai dengan pedoman buku petunjuk teknis kampung KB dan sesuai arahan mulai dari pelaksana PKB/PLKB Kecamatan, DPPKB/Sub PPKBD dan para kader, serta pengurus kampung KB yang terkait.

Sehingga hasil penelitian terkait indikator struktur birokrasi program kampung KB tidak terdapat masalah atau kendala, dan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan program kampung KB di Desa Sribunga

prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan arahan serta berpedoman dengan buku petunjuk teknis kampung KB. Sedangkan untuk fragmentasi juga sudah diterapkan dan terstruktur, pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai, dan para implementor sudah terkoordinasi untuk menciptakan kerja sama yang baik dan selaras.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai implementasi program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur belum dapat dikatakan berhasil karena belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari melihat masalah, mengumpulkan data, observasi dan melakukan wawancara secara mendalam tentang program kampung KB. Kampung KB merupakan program yang dikemas dalam inovasi baru, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsip program KKBPK yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan peneliti selanjutnya dideskripsikan menggunakan teori dari Edward III yang mana terdapat empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut adalah penjabaran dari implementasi program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur.

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dilihat dari penyampaian informasi, kejelasan informasi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Namun untuk kejelasan informasi belum begitu berjalan sesuai dengan harapan karena kelompok sasaran sebagian besar tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan implementor mengenai kegiatan program kampung KB.

2. Sumber Daya

Pada indikator sumber daya yang terdapat di program kampung KB di Desa Sribunga bahwa belum memadai dalam pelaksanaannya. Terdapat tiga sub indikator yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia belum tercukupi, hal ini dikarenakan implementor masih terdapat kekurangan dan latar belakang pendidikannya juga rendah yaitu rata-rata berpendidikan SMP, dan hal ini menyebabkan satu orang merangkap dua jabatan dan fungsi, dan untuk kelompok sasaran sudah tercukupi. Sumber daya anggaran juga belum bisa menunjang kebutuhan dalam pelaksanaan kampung KB di Desa Sribunga dan untuk sumber daya fasilitas tidak mengalami kekurangan dan sudah mendukung dalam pelaksanaan program kampung KB. Sehingga pada indikator sumber daya belum begitu memadai karena terdapat dua sub indikator yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran kurang memadai dan membua program kampung KB belum berhasil.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan indikator disposisi dilihat dari sikap implementor dan kelompok sasaran sudah cukup baik dalam merespon program kampung KB, mereka menerima bahkan senang dengan adanya program ini. Hanya saja pengetahuan dan pemahaman implemendor dari pihak yang berada di Desa Sribunga belum begitu optimal, yang membuat kegiatan pelaksanaan program tidak berjalan aktif dan belum berdampak untuk meningkatkan kualitas keluarga sejahtera.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua sub Indikator yaitu SOP dan fragmentasi, pada sub indikator SOPnya, SOP yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi program kampung KB di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur yaitu buku petunjuk teknis kampung KB serta sudah mengikuti arahan. Fragmentasi sudah dilaksanakan dengan baik, pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai dan terstruktur, dan para implementor sudah terkoordinasi untuk menciptakan kerja sama yang baik dan selaras.

Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan barat.

Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2019, diakses:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa-pada-02-maret-2019>.

Kampung KB, diakses:

Kampung KB. (n.d.). Retrieved Maret 01, 2020, from BKKBN: <http://www.kampungkb.bkkbn.go.id>

Petunjuk Teknis Kampung KB, diakses:

http://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/30360000244_juknis_kampung_kb.pdf. pada 01 maret 2020.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z., 2016, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan.
- Gunawan, I., 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hardiyansyah, 2017, *Manajemen Pelayanan Dan Pengembangan Organisasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Indiahono, D., 2017, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, D., 2018, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Munadi, M., & Barnawi, 2011, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, Ar-ruzz Media, Jogjakarta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R., 2015, *Implementasi Kebijakan Publik*, gava Media, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suaib, Muhammad Ridha, 2016, *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*, Calpulis, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis kebijakan: Dari Formulasi Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Profil Desa Sri Bunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Tahun 2018.
- Profil kampung KB Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Tahun 2018.
- Faktor Penyebab Lajunya pertumbuhan Penduduk Indonesia, diakses:
- Yovensius Yoni Diannada, Y. O. N. I., 2019, *Implementasi Kebijakan Daerah Progam Kampung Keluarga Berencana Di Desa Riam Tapang*